

Press Release**“Nasib Ekonomi Pasca Pilkada”**

Jakarta, 03 Juli 2018

Kantor INDEF

Dinamika politik seperti Pilkada serentak kerap kali dianggap sebagai ‘batu sandungan’ akselerasi ekonomi, seiring meningkatnya eskalasi ketidakpastian sehingga terjadi aksi “*wait and see*”. Di sisi lain, Pilkada juga dapat bernuansa optimisme membawa angin perubahan dan menjadi mesin pendorong perekonomian di daerah. Dampak positif maupun negatif hajatan demokrasi ini bagi perekonomian akan tampak lebih gamblang usai Pilkada dilaksanakan. Cukup amannya pelaksanaan Pilkada serentak 27 Juni 2018 sesungguhnya merupakan modal kuat untuk membangkitkan optimisme perekonomian. Namun, sejauh ini berbagai indikator ekonomi belum memberikan sinyal akan hadirnya optimisme ini. Inflasi umum rendah, namun stagnansi daya beli masih saja terjadi. Kenaikan bunga acuan juga belum mampu menjinakkan laju Rupiah yang semakin melemah. Defisit neraca perdagangan justru semakin menekan, dipicu lonjakan impor menghadapi bulan puasa dan hari raya lebaran. Akankah nasib ekonomi Indonesia pasca Pilkada berubah, atau justru semakin tertekan seiring berlanjutnya ketidakpastian? Berikut catatan INDEF terkait dengan kondisi perekonomian pasca pilkada 2018. konsumsi yang pada akhirnya menurunkan penerimaan pajak dari PPN maupun PPh Badan.

1. Inflasi rendah, daya beli tidak tergugah.

- Secara umum inflasi hingga Juni 2018 tergolong kategori rendah, namun **harga di sektor transportasi dan bahan makanan tetap tidak dapat dikendalikan secara efektif**. Pada lebaran kali ini, kedua kelompok tersebut menjadi penyumbang tertinggi inflasi Juni 2018.
- **Daya beli tertahan, stimulus perekonomian tidak bisa dioptimalkan**. Sektor konsumsi sampai tengah tahun belum cukup terpengaruh secara kumulatif akibat tertahannya daya beli masyarakat. Akibatnya, pengaruh hari

raya dan Pilkada tidak dapat memberikan sumbangsih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan-II 2018.

- **Ketergantungan impor tinggi, depresiasi membayangi inflasi.** Anomali semakin besarnya impor khususnya barang konsumsi ditengah depresiasi, semakin memicu pelemahan rupiah. Dampaknya akan terasa pada kenaikan harga-harga barang konsumsi tidak tahan lama, makanan dan minuman rumah tangga, serta Bahan Bakar Minyak (BBM). Artinya potensi *imported inflation* semakin meningkat dan akan berujung pada penurunan daya beli masyarakat.
- **Harga BBM dinaikan, daya beli terancam.** Dengan biaya transportasi rata-rata masyarakat Indonesia saat ini sebesar 30 persen dari penghasilan, maka masyarakat akan mengurangi konsumsinya terhadap barang konsumsi lainnya untuk mengkompensasi kenaikan harga beberapa jenis BBM non subsidi yang naik 1 Juli 2018 lalu.

2. Bunga acuan melejit, target pertumbuhan ekonomi makin sulit.

- Jumat, 29 Juni 2018 BI menaikkan bunga acuan (BI 7DRR) hingga 50 bps guna menahan laju depresiasi Rupiah yang cukup dalam. Posisi bunga acuan saat ini 5,25 persen. Implikasi dari upaya BI melakukan stabilisasi melalui **penaikan bunga acuan akan ‘mengganggu’ target pertumbuhan ekonomi.**
- **Urgensi menahan diri dari ‘obral’ obligasi.** Kenaikan bunga acuan akan membuat pasar obligasi diminati. Namun demikian, dengan memperhatikan efektivitas utang pemerintah yang tumpul dalam mengakselerasi ekonomi, maka situasi kenaikan bunga acuan saat ini tidak boleh menjadi *‘windfall’* bagi pemerintah untuk memacu utang. Jika agresifitas pemerintah dalam perburuan pendanaan melalui utang meningkat, dikhawatirkan ‘perang bunga’ akibat berkurangnya likuiditas tidak terhindarkan. Lebih dari itu, ‘obral’ obligasi di tengah situasi kontraksi ekonomi dapat berakibat pada pengetatan likuiditas yang berlebihan, sehingga kebijakan mengalami ‘overdosis’.

- **Kenaikan bunga acuan hanya ‘obat penenang’.** Kenaikan BI 7 DRR jumat lalu hanya merupakan obat sementara atas volatilitas Rupiah yang sudah di luar batas, yang dampaknya juga belum tentu efektif menghentikan pelemahan. Oleh karena itu, BI dan Pemerintah tidak boleh lengah. Setelah kenaikan bunga acuan ini, harus ada kebijakan yang langsung mengarah pada perbaikan fundamental ekonomi, terutama sektor riil dan perbaikan transaksi berjalan.
- **Tekornya transaksi berjalan (jangan) dibiarkan.** Biang keladi depresiasi Rupiah saat ini sebenarnya adalah faktor fundamental ekonomi yang rentan dari gejolak eksternal. Salah satu sumber ‘penyakit’ loyonya Rupiah adalah defisit transaksi berjalan. Oleh karena itu, harus ada upaya sangat serius dari pemerintah untuk dapat mengakhiri defisit ini. Jika upaya menggenjot ekspor masih sulit dilakukan, maka konsekuensinya adalah sekuat tenaga mengurangi impor dan mensubstitusinya dengan produk domestik.
- **Momentum bangkit ekonomi domestik.** Rupiah yang semakin melemah membuat barang-barang impor (maupun yang berkonten impor) akan semakin mahal. Padahal ekonomi Indonesia saat ini sangat tergantung dari impor. Inilah saatnya pemerintah mengoptimalkan kebijakan berbasis bahan baku domestik untuk menggantikan bahan baku dan bahan penolong impor.

3. Impor melaju kencang, ekonomi kian rentan.

- **Dominasi impor masih besar.** Total impor Mei 2018 sebesar 17,6 miliar dollar AS, lebih besar dibandingkan pada impor Mei 2017 sebesar 14,3 miliar dollar AS. Jika depresiasi rupiah secara teori mampu menurunkan impor, hal ini tidak terjadi di bulan Mei. Depresiasi rupiah justru meningkatkan impor, baik secara nilai maupun volumenya.
- **Impor barang konsumsi terus meningkat.** Komposisi impor non-migas meningkat, Mei 2018 sebesar 14,8 miliar dollar AS, sebelumnya Mei 2017 sebesar 11,9 miliar dollar AS. Komposisi terbesar masih pada bahan baku penolong, namun kecepatan pertumbuhan impor terbesar dimiliki barang

konsumsi. Selama 4 tahun terakhir, porsi impor barang konsumsi meningkat sebesar 8,6 persen per tahun, bahan baku penolong hanya 1,3 persen per tahun.

- **Manfaatkan ketidakpastian perang dagang melalui ekspor.** Membaiknya kinerja ekspor Mei sebesar 16,1 miliar dollar AS atau naik 10,9 persen dari bulan April diiringi depresiasi rupiah menjadi modal untuk memanfaatkan ketidakpastian perdagangan AS-China. *Trade diversion* (pengalihan perdagangan) oleh importir AS dan China harus dimanfaatkan segera. Indonesia perlu memperluas pangsa pasarnya di AS yang selama 20 tahun terakhir hanya menguasai 0,9 persen.

4. **Pilkada usai, geliat ekonomi harus dimulai.**

- **Benefit ekonomi Pilkada harus dijaga agar tidak muncul hanya ketika momen pilkada saja.** Hal ini harus diupayakan oleh kepala daerah terpilih dengan melakukan: 1) **Implementasi janji-janji saat kampanye.** Kepala daerah terpilih harus berani membuat kontrak politik dengan masyarakat sebagai instrumen untuk mengawal janji politik kepala daerah. 2) **Meningkatkan kapasitas fiskal APBD daerah.** Belanja rutin di daerah menjadi penghambat APBD dalam berperan lebih bagi pembangunan. Lebih dari itu, keterbatasan belanja modal (di bawah 30 persen) juga menjadikan Pemerintah Daerah tidak leluasa dalam membangun.
- **Melakukan kerjasama antar wilayah untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.** Kerjasama antar kabupaten/kota penting dalam rangkai perwujudan pusat pertumbuhan baru dengan memanfaatkan spesialisasi masing-masing kabupaten/kota. Namun, kerjasama ini seringkali tidak terwujud, pun terwujud hasilnya tidak optimal, dikarenakan adanya ego antar daerah.
- **Memperbaiki kinerja investasi di daerah.** Usainya Pilkada serentak 27 Juni 2018 harus dijadikan momentum berakhirnya ketidakpastian politik di daerah.

100 hari pertama sejak 171 kepala daerah tersebut dilantik, kinerja investasi di daerah harus membaik.

- **Maksimalkan *event* nasional dan internasional** yang akan diselenggarakan di dalam negeri **untuk akselerasi ekonomi**. Mulai dari Asian Games, HUT Kemerdekaan RI, Harbolnas, dan *event* lain perlu digaungkan secara maksimal agar menjadi stimulus perekonomian nasional dan daerah.

Sarwo Edhie (+62813 8047 7878)